

## Polisi Yang Mandiri

Oleh : Jenderal Polisi (Pur) Drs. Kunarto (Mantan Kapolri)

---

Pola dasar berpikir tentang Polisi di negara demokrasi adalah: pertama, di alam tata kenegaraan yang demokrasi. Polri yang bukan Angkatan Perang harus terpisah dari mereka. Di alam demokrasi istilah ABRI harus tidak digunakan lagi. Yang ada hanya Polri dan APRI. Biar tegas TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU - itu APRI. Jangan lagi ada istilah ABRI. Kedua, dimana posisi Polri yang paling tepat?

Tergantung pada kearifan bangsa. Bisa dibawah DEPKEH - bisa dibawah DEPdagri dan bisa di bawah DEPHANKAM. Namun juga dapat mandiri langsung di bawah Presiden dengan status sejajar Departemen dan Kapolri berkedudukan sebagai Menteri.

Dimasa lalu - 2 kali Kapolri itu berkedudukan sebagai Menteri. Bahkan yang kedua diberi sebutan Men/Pangak - Menteri



Panglima Angkatan Kepolisian, dimana status itu berakhir pada awal ORBA sewaktu dicanangkan integrasi penuh ABRI yang puncak pimpinannya adalah MENHANKAM/PANGAB.

Di dunia ini hanya ada 2 negara yang Kepala Polisi nya berkedudukan sebagai Menteri - yakni Israel dan Brasilia. Mereka diberi kedudukan seperti itu karena problema kepolisiannya sangat kompleks - gangguan keamanan dan ketertiban umum sangat tinggi, sehingga pimpinan negara mereka selalu memerlukan Kepala Polisi yang dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan yang cepat dan tepat.

Berdasarkan butir-butir pemikiran di atas itu, penulis sampai pada persepsi bahwa paling tepat Polri itu, diberi kewenangan untuk mandiri. Agar dia dapat meletakkan pola-pola tindak dan menetapkan kebijakan Kamtibmas secara mantap dan terbebas dari pengaruh-pengaruh sektoral - yang apabila pengaruh-pengaruh itu menajam, tidak mustahil Polri akan cenderung menjadi alat kekuasaan dan bukan alat negara yang harus bertindak adil dan benar serta tidak memihak pada satu kekuatan politik tertentu (biasanya memihak penguasa atau pemerintah atau yang buruk lagi selalu memihak yang kuat dan menindas yang lemah - ini akan menyalahi falsafah kepolisian yang universal, HAM, etika dan bahkan norma-norma umum keadilan). Disamping itu, ke-

kuatan Polri dewasa ini. Apalagi kalau Polri nanti harus dikembangkan untuk mencapai rasio 1 : 1000 saja - diperlukan tambahan lebih dari 40.000 orang rekrutimen baru. Maka Polri tidak akan ada tandingannya di dunia ini.

Polisi di Amerika Serikat kalau dijumlah, mereka mungkin lebih besar, tetapi satuan mereka bersifat desentralisasi dan terpecah dalam satuan Departemen Kepolisian yang mandiri. Kalau Indonesia menjadi negara federasi bagaimana? kepolisian di dunia dewasa ini berkecenderungan mengarah pada bentuk *National Police* - seperti yang ada di Indonesia. Yang terdekat degnan kita : Malaysia dan Philipina telah terorganisasi menjadi *National Police*. Sehingga secara organisatoris prosedural - Polri sudah diorganisasikan sebagai Polisi Modern, yang rasanya tidak perlu dirubah.

Dengan gambaran seperti itu, rasanya sangat wajar kalau di alam demokrasi, Polri bersifat mandiri dan Kapolri diberi status/ kedudukan Menteri. Sehingga Polri berkedudukan sebagai Departemen tersendiri - logikanya DEPHANKAM lalu terbelah dalam Departemen Pertahanan dan Departemen Polri (keamanan).

Pada awal uraian, diketengahkan bahwa semua ini ditentukan oleh kearifan bangsa. Namun kearifan bangsa itu juga akan ditentukan oleh pemahaman mereka tentang idealisme dan perspektif mereka tentang dunia

yang bila tidak terkendali juga cenderung ingin membentuk "negara polisi" yang buruknya bisa melebihi "militerisme".

Sebenarnya ABRI, dengan instruksi Pangab telah mengkaji proses gradual pemisahan Polri dari ABRI, yang hasil akhirnya tersirat dalam pernyataan-pernyataan Pangab dan penegasan yang mengambang dari Presiden Habibie pada HUT ABRI 1998: yang terkesan Polri itu dilepas kepalanya tetapi ekornya dipegang erat-erat, hingga Polri tetap jinak - yang dalam bahasa organisasi militer - semuanya tetap "*under control*". Polri dan berbagai Universitas juga sudah melakukan banyak kajian tentang pemisahan itu. Tetapi hasil akhir rumusannya tidak pernah ada ketegasan. Lahirnya takut - tetapi batinnya mau. Sehingga yang terumuskan banyak kata-kata bersayap dan penuh pengandaian. Sebenarnya sikap banci seperti itu tidak perlu diambil. Karena masyarakat kita jelas sekali mengarah pada realisasi masyarakat madani yang ideal. Masyarakat madani selalu diwarnai dengan ciri dasar - demokratisasi, transparansi dan keterbukaan. Dalam masyarakat seperti itu pengendali keamanan memang hanya berada di tangan Polri. Bukan organ negara yang lain khususnya tentara.

Dengan berbagai kepastian seperti itu, hampir pasti juga - polisinya bukan bagian dari ABRI. Nah, lalu bagaimana? Semua petinggi Polri selalu merespons dengan kata-kata: Polri



Dengan memperhitungkan SU - MPR 1999 sebagai hasil Pemilu 1999, diharapkan salah satu

TAP MPR menggariskan secara tegas terpisahnya Polri dari APRI. Seharusnya TAP seperti itu harus dijawab dengan GBHN POLRI yang konkrit

TAP MPR menggariskan secara tegas terpisahnya Polri dari APRI. Seharusnya TAP seperti itu harus dijawab dengan GBHN POLRI yang konkrit, yang sering disebut sebagai "*blue print*" - atau cetak biru pengembangan Polri. Cetak biru itu harus dilengkapi dengan "*map of road*" - atau prioritas dan selektifitas tindakan, agar secepatnya tujuan serta sasaran antara keterpisahan Polri itu dicapai dengan lancar. Ini bukan tugas ringan karena sejak sekarang Polri harus dapat menjual ide yang diterima oleh masyarakat luas. Tidak boleh kalah gengarnya dengan kampanye Parpol yang sekarang ini sudah setengah jalan. Sedang Polri rasanya

semua kewenangan Polri yang selama ini "diambil" orang, (4) Hapuskan organisasi pengamanan yang duplikatif, (5) Tetapkan langkah-langkah menuju Polri yang PEEM dalam mengamankan negara. Dan lain-lain yang boleh ditambah butir-butir strategis yang lain. Lalu gerakkan seluruh kekuatan untuk merealisasikan semua ini dengan ngotot dan semangat tinggi.

Duplikasi pengamanan itu misalnya; kalau sudah ada Polres kenapa harus ada Kodim? Berapa uang negara yang bisa dihemat kalau duplikasi itu hilang? Karena rekrutmen polisi baru yang besar sulit dilaksanakan, mengapa tidak merekrut dari tentara yang berlebih? Dalam contoh ini, tentara Kodim bisa dijadikan polisi saja. Uang negara akan lebih dihemat. Sedangkan kualitasnya dapat digenjot pada pendidikan tambahan Kepolisian. Kiranya akan banyak sekali tentara yang berminat menjadi polisi. Sehingga penyesuaiannya tidak akan sulit.

Polri harus dapat menekankan bahwa - pengamanan dan keamanan itu memang mahal. Tetapi pasti tidak semahal dengan mengembangkan sistem keamanan seperti saat ini. Katanya anggaran Kodam itu hampir sama dengan anggaran Polri. Kalau saja anggaran 5 Kodam dilimpahkan pada Polri, negara akan

terpelesetnya Polri dalam kejadian negatif atau penyimpangan yang sekecil apapun, secara langsung akan direspons rakyat, yang berarti dagangan Polri akan tidak laku atau tidak bisa diterima. Untuk itu adalah mutlak bahwa Polri harus dapat melakukan reformasi internal yang sangat intensif agar cara kerja betul-betul efektif dan efisien. Menegak hormati HAM, memenuhi tuntutan masyarakat dengan optimal serta merubah paradigma dari polisi kekuasaan menjadi polisi yang memihak rakyat. Tetapkan semua ini dalam rencana strategis yang konkrit dan perjuangkan realisasinya dengan keyakinan dan semangat yang tinggi.

Dalam perjuangan ini, Polri sangat mungkin harus berkorban. Korban sebesar apapun harus dihadapi dengan keyakinan penuh bahwa semua pengorbanan itu tidak akan sia-sia. Semua harus ngotot memperjuangkan kedudukan dan status, sampai suatu saat berhasil. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti sebelum cita-cita yang diletakkan tuntas sama sekali. Semua harus satu kata, jangan pernah ada yang mengkhianati perjuangan. Dan jangan seperti saat ini hatinya ingin, namun realisasinya penuh keraguan dan kebimbangan.

Kerja sudah dimulai - semua harus dilak-